

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Studi tentang perkotaan merupakan studi yang relevan dan banyak dikaji perkembangannya dari tahun ke tahun. Tidak hanya terbatas pada keadaan fisik perkotaan yang menyangkut infrastruktur dan tata guna lahan, banyak studi mengkaji interaksi masyarakat, jarak sosial, dan budaya yang terbentuk didalamnya. Keseluruhan komponen fisik, sosial, budaya, dan ekonomi tersebut membentuk citra perkotaan. Kota kerap kali digambarkan sebagai masyarakat yang memiliki peran kelompok sekunder yang besar, tingkat anonimitas yang tinggi, masyarakat yang heterogen, tingkat mobilitas sosial tinggi, interaksi masyarakat berorientasi kepentingan, serta ketersediaan sarana, prasarana dan pelayanan yang memadai.¹ Kota menjadi pusat perekonomian. Banyak barang dan jasa yang dikonsumsi secara kolektif, diproduksi dalam industri yang berkembang di perkotaan.² Karakteristik kota yang melekat pada pandangan masyarakat umum ini mendorong fenomena pemusatan penduduk dalam wilayah yang sempit, karena arus migrasi terus menerus meningkat. Kota menjadi tempat transit aktivitas masyarakat dari berbagai wilayah.

¹ Agusniar Rizka Luthfia, 2013, Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah, *Journal of Rural and Development* IV(2), hlm. 137

² Hans Dieter Evers, 1986, *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 10

Berkembangnya suatu kota dapat membawa pada lebih banyak permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ketidakmampuan kota memenuhi konsumsi kolektif penduduknya menjadi masalah yang fundamental yang dapat membawa penyimpangan sosial anggota masyarakat dalam kompetisinya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup dalam berbagai aspek. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, lebih lanjut membawa dampak pada isu keamanan hidup masyarakat. Isu keamanan kota, negara, dan wilayah telah menjadi perhatian banyak negara, termasuk pula Indonesia dan ibukotanya, yaitu DKI Jakarta. Status kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus perekonomian Indonesia, pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk mencapai 10,47 juta jiwa dengan luas wilayah 661,5 km. Apabila diukur, Jakarta termasuk kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.³ Kepadatan penduduk ini menjadikan persaingan bertahan hidup di Jakarta berlangsung ketat dan menimbulkan berbagai macam kriminalitas, karena tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan kriminal yang dimaksud ialah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan data statistik kriminal di Indonesia tercatat bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat 234.614 kasus kejahatan dan 21.473 kasus diantaranya merupakan laporan kasus yang terjadi di ibu kota. Adapun rincian kasusnya sebagai berikut.⁴

³ BPS, 2020, Proyeksi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kecamatan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2018, *Data*, diakses melalui <https://jakarta.bps.go.id/dynamictable/2020/03/04/419/3-1-5-proyeksi-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kecamatan-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-2018.html> pada 3 Maret 2020 pukul 11:47

⁴ Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistik Kriminal 2020*, Jakarta, BPS RI, hlm. 147-163

Tabel 1.1
Data Kriminalitas Indonesia dan DKI Jakarta

Jenis Kejahatan	Kasus di Indonesia	Kasus di DKI Jakarta
Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan)	1.024 kasus	75 kasus
Kejahatan terhadap fisik/badan (KDRT, penganiayaan berat dan ringan)	39.567 kasus	2.006 kasus
Kejahatan terhadap kesusilaan (pemerkosaan dan pencabulan)	5.258 kasus	136 kasus
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur)	2.545 kasus	38 kasus
Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan (pencurian dengan kekerasan, senjata api, dan senjata tajam)	8.423 kasus	405 kasus
Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan (pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, perusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja dan penadahan)	90.757 kasus	4.349 kasus
Kejahatan terkait narkoba	39.588 kasus	8.715 kasus
Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi	43.852 kasus	5.526 kasus
Kejahatan terhadap ketertiban umum	3.600 kasus	223 kasus

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Selain data pada tabel di atas, BPS juga memuat data yang menunjukkan bahwa persentase korban kejahatan terbesar di DKI Jakarta ialah pencurian, dengan persentasenya sebesar 88,95%.⁵ Tingginya persentase ini mendorong dilakukannya berbagai upaya *surveillance* di tempat umum, jalan, bahkan perumahan/pemukiman masyarakat. Berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan ialah perekrutan satpam, pembuatan portal/pagar, ataupun pemasangan CCTV. CCTV merupakan *technology surveillance* yang memungkinkan pengawasan dilakukan selama 24 jam. Penggunaan CCTV saat ini marak ditemukan pada ruang-ruang kota di DKI Jakarta. Berdasarkan survei online yang dilakukan pada 53 orang berdomisili di DKI Jakarta, didapati bahwa tempat-tempat yang seringkali ditemukan menggunakan CCTV sebagai sistem pengawasan ialah mall (67,9%), restoran/tempat makan (11,3%), jalan raya/jalan tol (9,4%), pemukiman/perumahan (7,5%), supermarket (1,9%), dan kampus/instansi pendidikan (1,9%).⁶

Maraknya penggunaan CCTV saat ini telah banyak memberi manfaat bagi penanganan kasus-kasus kriminalitas. Hal ini dikarenakan rekaman CCTV yang tersimpan, diakui dan dapat dijadikan sebagai bukti hukum sah dalam pelaporan tindakan kriminalitas. Selain manfaatnya dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan atau tindak kriminalitas, CCTV saat ini telah membantu polisi menindak pelanggaran lalu lintas dengan efektif – yaitu tilang *online* – sehingga peraturan lalu lintas dapat lebih ditegakkan atau dijalankan. Walaupun banyak memberi manfaat, dalam

⁵ *Ibid*, 232

⁶ Survei online dilakukan dengan penyebaran google form di sosial media twitter dan whatsapp pada 4-11 Desember 2020

beberapa kasus CCTV juga telah memberi peluang bagi terjadinya kasus kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam memonitoring CCTV. Salah satu kasusnya ialah penyelewengan kuasa oleh dua orang pegawai kedai kopi Starbucks Sunter Mall, Tanjung Priok yang melakukan pelecehan non verbal kepada salah satu pelanggan *dine-in* dengan *zoom-in* ke bagian tubuh seorang perempuan.⁷

Oleh karena manfaat yang diberikan lebih menonjol, dibandingkan kasus-kasus penyalahgunaan, CCTV tetap menjadi tipe keamanan yang disukai, bahkan untuk lingkungan pemukiman/perumahan. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan sebanyak 25 jawaban survei (47,2%) memilih tinggal di pemukiman/perumahan dengan CCTV yang terpasang di beberapa sudut jalan. Sedangkan untuk jawaban lainnya, sebanyak 45,3% responden memilih pemukiman dengan satpam yang *standby* di pos satpam dan sesekali berkeliling memantau lingkungan secara rutin; 5,7% memilih pemukiman dengan siskamling; dan 1,9% memilih pemukiman dengan portal/pagar.⁸ Berangkat dari keseluruhan survei singkat ini, dapat dipahami bahwa pemasangan CCTV di kawasan pemukiman kota tidak banyak ditemukan, namun menjadi harapan dan permintaan bagi sebagian besar masyarakat kota DKI Jakarta untuk menunjang keamanan lingkungan.

⁷ Muhammad Isa Bustomi, 2020, Fakta Kasus Pelecehan Lewat CCTV di Starbucks, *Berita*, diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/04/08090451/fakta-kasus-pelecehan-lewat-cctv-di-starbucks?page=all> pada 10 Desember 2020 pukul 13:37

⁸ Survei online dilakukan dengan penyebaran google form di sosial media twitter dan whatsapp pada 4-11 Desember 2020

Kemampuan CCTV dalam meningkatkan keamanan pada dasarnya dapat dipahami melalui cara penegakan disiplin yang dijalankannya. Peran CCTV sebagai instrumen kontrol sosial disipliner dapat dipahami dalam konsep panopticon Foucault. Panopticon merupakan metafora dari suatu pengawasan modern.⁹ Penggandaan pandangan yang bekerja pada CCTV, menjadikan sasaran pengawasan merasa selalu terawasi, sehingga terdorong kesadaran individu untuk mengendalikan aktivitas atau tindakan yang dilakukannya. Oleh karenanya, konsep panopticon ini menggambarkan bentuk kekuasaan pendisiplinan yang menormalisasi atau menghomogenisasikan individu dalam suatu ruang.¹⁰ Upaya homogenisasi memastikan nilai dan norma, dapat terpelihara dan terlaksana dengan baik dalam masyarakat.

Situasi kerawanan kejahatan yang meresahkan dan berpotensi mengganggu kestabilan di ruang kota Jakarta, salah satunya terjadi pada kawasan Pemukiman Belanak, Pulogadung, Jakarta Timur. Pada 2017, media mempublikasikan adanya penangkaptanganan kasus pencurian rumah kosong di Pemukiman Belanak oleh seorang pencuri spesialis.¹¹ Selain kasus tersebut, tingkat kerawanan Pemukiman Belanak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang juga cukup rawan. Hal ini dapat dilihat dari catatan laporan kejahatan yang dimiliki Kepolisian Sektor Pulogadung. Tiap tahunnya, Polsek mencatat adanya kasus-kasus penganiayaan

⁹ Iafet Leonardi Bricalli, 2019, The Paradoxes in the Use of the Panopticon as a Theoretical Reference in Urban Video-Surveillance Studies: A Case Study of a CCTV System of a Brazilian City, *Foucault Studies* 1(27), hlm. 145

¹⁰ *Ibid*, 147

¹¹ Joko Supriyanto, 2017, Aksi Pencurian Rumah Kosong Berhasil Digagalkan oleh Warga di Pulogadung, *berita*, diakses melalui <https://wartakota.tribunnews.com/2017/06/19/aksi-pencurian-rumah-kosong-berhasil-digagalkan-oleh-warga-di-pulogadung> pada 3 Maret 2020 13:25

ringan dan berat; pengeroyokan; percobaan pencurian; pencurian biasa dan berat; pencurian dengan kekerasan; pencurian kendaraan bermotor roda dua dan empat; pemerasan; kebakaran; penipuan; penggelapan; narkoba; kenakalan remaja/senjata tajam; pemerkosaan; KDRT; perjudian. Total kasus per tahunnya sendiri dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.2
Kasus Kriminalitas Pulogadung

Tahun	Jumlah Kasus Dilaporkan
2015	104 kasus
2016	258 kasus
2017	145 kasus
2018	98 kasus
2019	104 kasus

Sumber : Data Polsek Pulogadung (2020)

Kondisi pemukiman dan lingkungan sekitar pemukiman yang rawan tindak kejahatan, mendorong ketua RT dan masyarakat setempat bersepakat untuk memasang CCTV pada beberapa sudut jalan, karena berbagai teknik pengawasan yang sebelumnya diterapkan (portal dengan pengaturan jam buka-tutup) kurang mampu menekan kasus kejahatan di lingkungan pemukiman. Sebagaimana pemaparan sebelumnya terkait kuasa panopticon dalam mendisiplinkan secara ‘otomatis’, urgensi penelitian ini berupaya mengkaji CCTV sebagai bentuk kuasa panopticon yang mengendalikan tindakan dan aktivitas sehari-hari masyarakat, sehingga kestabilan lingkungan terbentuk dalam masyarakat, secara khusus dalam konteks Pemukiman Belanak.

Oleh karena panopticon sebagaimana disebutkan sebelumnya, berperan dalam memelihara dan menjamin terlaksananya nilai dan norma, maka melalui kajian ini, batasan-batasan tindakan atau nilai dan norma yang berusaha ditegakkan dalam aktivitas masyarakat di ruang perkotaan, khususnya dalam lingkungan pemukiman tersebut dapat diketahui. Selain mengkaji dari segi keamanan, penelitian ini juga berupaya mengkaji dari segi kemasyarakatannya. Karakteristik masyarakat pemukiman setempat digali untuk mendapatkan gambaran kemungkinan keterhubungan antara karakteristik masyarakat perkotaan dengan eksistensi CCTV sebagai solusi keamanan banyak ruang perkotaan sebagaimana ditunjukkan hasil survey.

1.2 Permasalahan Penelitian

Tempat tinggal dimaknai sebagai benteng kehidupan dan taman surga yang memberikan perasaan nyaman, aman, dan tenteram dari kehidupan luar (aktivitas kuliah, bekerja, dan lain sebagainya) yang penuh dengan kompetisi bahkan konflik bagi masyarakat perkotaan.¹² Konteks tempat tinggal disini dimaknai secara luas, yaitu rumah dan juga lingkungan pemukiman tempat rumah tinggal berada. CCTV merupakan salah satu sistem keamanan yang berbasis teknologi yang memungkinkan menyimpan rekaman area yang diawasi 24 jam. CCTV seringkali dipandang sebagai solusi keamanan. Beberapa penelitian nasional dan internasional telah banyak memfokuskan kepada penelitian ini dengan setting lokasi yang

¹² Prof. Dr. Damsar dan Dr. Indrayani, 2017, *Pengantar Sosiologi Perkotaan*, Jakarta, Kencana, hlm. 176

umumnya membahas penggunaan CCTV di ruang publik (jalan tol/jalan raya) dan pusat-pusat komersial (mall). Secara khusus, fenomena CCTV dalam penelitian kali ini difokuskan pada kawasan pemukiman, yaitu Pemukiman Belanak. Pemasangan CCTV yang merupakan inisiatif warga setempat ini diharapkan mampu menangani kondisi ketidakstabilan di lingkungan pemukiman. Permasalahan ini menurunkan dua pertanyaan inti penelitian:

1. Bagaimana latar belakang lingkungan masyarakat yang memilih menggunakan CCTV sebagai alat pengawasan di Pemukiman Belanak, Jakarta Timur?
2. Bagaimana CCTV bekerja sebagai bentuk panopticon di lingkungan Pemukiman Belanak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menguraikan latar belakang masyarakat menggunakan CCTV di Pemukiman Belanak, Jakarta Timur.
2. Menguraikan operasional CCTV sebagai bentuk panopticon di lingkungan Pemukiman Belanak.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Akademis**

Hasil dan analisis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait *technology surveillance*, seiring banyaknya penggunaan instrumen seperti CCTV saat ini. Walaupun dalam kajian internasional, banyak ditemukan kajian yang membahas penggunaan CCTV, pada kajian nasional tidak banyak ditemukan yang membahasnya secara sosiologis. Penelitian CCTV masih banyak yang berfokus pada teknis dari instrumen CCTV, ketimbang efek pendisiplinan yang dihasilkannya dalam masyarakat. Oleh karena, riset yang disajikan diharapkan menjadi referensi bagi kajian sosiologi perkotaan yang berkaitan dengan *surveillance*, pendisiplinan, penggunaan ruang kota, ataupun ranah-
ranah yang terkait.

- **Manfaat Praktis**

Pada ranah yang lebih kecil, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi teknik *surveillance* yang diterapkan oleh Pemukiman Belanak. Pada ranah yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi individu, kelompok masyarakat, institusi, ataupun pemerintah, terkait efektivitas dan hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila hendak menggunakan CCTV, seperti tingkat visibilitas kesadaran yang terbentuk, serta penunjukkan dan edukasi *operator* dalam identifikasi pelaku dan tindakan menyimpang. Dengan demikian, CCTV tidak hanya dipergunakan sebagai alat pengawasan yang merekam aksi kejahatan atau barang bukti hukum, tetapi juga menjadi upaya preventif.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Mendukung penelitian *surveillance* CCTV di Belanak, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji penggunaan CCTV, biaya-biaya sosial CCTV, ataupun penerapan konsep panopticon Foucault.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Brandon C. Welsh, David P. Farrington, Sema A. Taherii mengenai “*Effectiveness and Social Costs of Public Area Surveillance for Crime Prevention*”. Topik dalam jurnal ini membahas efektivitas pengawasan di area publik dalam mencegah kejahatan dengan memperhitungkan biaya sosial yang dikeluarkan baik melalui pengawasan formal, pengawasan oleh karyawan, maupun pengawasan alami. Pencegahan kejahatan memiliki 2 perspektif teori. Pertama, pendekatan situasional yang menekankan pada modifikasi lingkungan fisik seperti bentuk bangunan pertahanan dan penerangan jalan (bentuk pengawasan alami) dan penggunaan CCTV (bentuk pengawasan formal). Kedua, pendekatan kontrol sosial dan kohesi yang melihat kemunculan kejahatan muncul dari kontrol lingkungan yang buruk. Menggunakan metode tinjauan sistematis literatur, Brandon C. Welsh, dkk mendapati bahwa CCTV efektif dipasang di tempat parkir mobil mengurangi kejahatan properti; penerangan jalan efektif di pusat kota (*city and town*) dan perumahan untuk mengurangi kejahatan properti; praktek *defensible space* (penutup jalan/barikade) efektif di lingkungan dalam kota (*city*) mengurangi kejahatan properti dan kekerasan.

Dalam penelitiannya, Brandon C. Welsh, dkk juga menyebutkan bahwa masalah privasi terlihat jelas dalam pemasangan CCTV dan menerima banyak

penolakan di pusat kota, perumahan umum, dan fasilitas transportasi. Kekhawatiran ini berkaitan dengan kurangnya protokol yang jelas untuk penggunaan CCTV. Selain privasi, gagasan ‘masyarakat benteng’ menguat dan terjadi pengucilan sosial dari populasi yang terpinggirkan. Pada akhirnya, peneliti menilai penerangan sebagai pengawasan yang memiliki keunggulan dibandingkan tingkat pengawasan lainnya. Penerangan yang lebih baik mendorong teknik pengawasan alami yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak melanggar privasi ataupun berkontribusi pada pengucilan kelompok sosial.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kathleen A. Cagney, Erin York Cornwell, Alyssa W. Goldman, dan Liang Cai dengan topik “*Urban Mobility and Activity Space*”. Penelitian ini membahas ruang aktivitas dan kaitannya dengan mobilitas perkotaan yang telah membentuk kembali 4 domain substantif penelitian sosiologi, yaitu ketimpangan spasial dan segregasi; keterhubungan dan keterlibatan sosial; kejahatan dan pola pelanggaran; kesehatan dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Penelitian menggunakan teori disorganisasi sosial sebagai kerangka panduannya. Menggunakan metode tinjauan literatur, Kathleen, dkk menemukan bahwa ketimpangan spasial dan segregasi dalam ruang aktivitas berkontribusi pada ketidaksetaraan akses sumber daya dan pola interaksi antarkelompok. Ketidakberuntungan dalam sosial ekonomi mempengaruhi ruang aktivitas seseorang yang lebih lanjut berpengaruh pada kesehatan dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Ketidaksetaraan struktural ini terjadi pula dalam ruang aktivitas antara masyarakat berusia tua dan muda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Torin Monahan dengan topik *“Electronic Fortification in Phoenix: Surveillance Technologies and Social Regulation in Residential Communities”* yang mengkaji perbedaan praktik dan hubungan kekuasaan yang ditimbulkan dengan memasukkan teknologi pengawasan ke dalam komunitas tempat tinggal (peran teknologi pengawasan dalam menstrukturisasi pengalaman sosial). Penelitian menggunakan konsep “kantong benteng” membentuk bangunan sosial yang secara politis mendorong segregasi sosiospatial dan mengirimkan pesan simbolis terkait siapa yang termasuk dan yang tidak. Penelitian juga menggunakan konsep morfologi ketakutan perkotaan yang disebabkan privatisasi ruang publik (Teresa P.R Caldeira) dan konsep Zygmunt Bauman yang menyebutkan bahwa polarisasi dan fragmentasi sosial memutus orang kaya dari tempatnya dan mengisolasi dari jaringan diluarnya.

Menggunakan metode penelitian kualitatif pada kompleks perumahan umum rakyat berpendapatan minimum dan 2 komunitas pagar di Phoenix, Torin Monahan mendapati bahwa teknologi pengawasan dalam praktiknya lebih memantau penghuni di dalam perumahan dan menghalangi persatuan dalam komunitas yang aktif pada komunitas pagar. Pada akhir penelitiannya, Torin Monahan menyimpulkan bahwa teknik pengawasan keamanan di Phoenix telah memperparah ketimpangan ekonomi yang ada dengan peninggalan program sosial dan peningkatan segregasi sosiospatial.

Keempat, penelitian Iafet Leonardi Bricalli dengan topik *“The Paradoxes in The Use Of The Panopticon as a Theoretical Reference in Urban Video-Surveillance Studies: A Case Study of a CCTV System of a Brazilian City”* yang

mengevaluasi penggunaan Panopticon sebagai teori banyak studi CCTV di ruang publik. Iafet melihat bahwa panopticon seringkali ditafsirkan literal hanya sebagai alat koreksi individu dalam ruang tertutup. Iafet menekankan modernitas sebagai proyek ketertiban yang membawa cita-cita serba tahu. Michel Foucault menggunakan panopticon sebagai tanda dimulainya masyarakat panoptikisme. Panopticon sebagai metafora model pengawasan merupakan instrumen disiplin yang bertujuan mengisi kekosongan yang ditinggalkan hukum, sehingga apabila penguasa berdaulat mengalami kegagalan, disiplin tetap sempurna karena konstan.

Iafet Leonardi melakukan observasi eksplorasi di 3 area kota Vila Vielha, Brasil Tenggara yang memiliki karakteristik sosio-spasial yang berbeda, yaitu Praia da Costa (perumahan penduduk terkaya), Gloria (lingkungan komersial dan industri bermobilitas orang dan barang yang tinggi), Riviera da Barra (lingkungan tertinggal di pinggiran kota). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Praia da Costa dan Gloria masyarakat tidak menyadari keberadaan CCTV dan mereka yang menyadari secara acuh tak acuh, tetap bertindak seolah tidak ada CCTV. Oleh karenanya, kehadiran kamera tidak cukup menjamin keteraturan publik, karena induksi pengendalian diri tergantung kesadaran terhadap pengawasan.

Kelima, penelitian Barbara Heebels dan Irina Van Aalst dengan topik *“Surveillance in Practice: Operators’ Collective Interpretation of CCTV Images”* yang menggambarkan praktik dan wacana kerja sehari-hari operator CCTV dan supervisornya melalui observasi dan wawancara di ruang kontrol pengawasan CCTV publik di Rotterdam. Barbara dan Irina menggunakan teori interaksionisme simbolis Erving Goffman untuk mengidentifikasi bagaimana operator memberi

makna pada gambar CCTV melalui pertukaran relasional (perbincangan formal dan informal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa humor yang dilakukan antar-operator dalam ruang kontrol dapat menghasilkan dan mempertahankan interpretasi bersama. Humor mencerminkan dan mempertentangkan perbedaan antara kelompok orang dalam skala besar dan memainkan peran dalam pembuatan makna. Humor juga menampilkan dan mengembangkan hubungan afektif dengan orang-orang yang ditonton (kegembiraan, cinta, kebosanan, kecemasan, frustrasi). Perbincangan operator dalam ruang kontrol mereproduksi dan menggambarkan ulang batasan antara “mereka” dan “kita” dalam perbedaan etnis/ras dan gender/seksualitas.

Keenam, penelitian Dadang Sudiadi dengan topik “*Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan: Suatu Analisis Tentang Penerapan Konsep Defensible Space-nya Newman dalam Upaya Pencegahan Kejahatan di Komplek Perumahan Pesona Depok I*” yang berupaya menjelaskan operasionalisasi konsep *defensible space* terhadap urgensi kejahatan. Melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan *test case* pada Komplek Perumahan Pesona Depok I, peneliti mendapati bahwa penerangan perumahan kurang, fasilitas umum banyak, dan terdapat satpam di dalam pos jaga yang menjalankan prosedur penitipan KTP warga pendatang, walaupun kerap kali terjadi kelalaian. Kohesi sosial penghuni kompleks yang kurang baik, *natural surveillance* yang tidak terwujud dengan adanya individualitas tinggi, mendorong Dadang Sudiadi menyarankan penggunaan konsep *secure guard area* yang menitikberatkan tanggung jawab petugas keamanan dalam memiliki aspek *defensible space* yaitu

mengenal seluruh penghuni perumahan, melakukan pemantauan keliling setiap perumahan dan melakukan mekanisme pengawasan ketat yang kontinu terhadap perizinan orang luar masuk ke dalam kompleks, baik berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan.



Tabel 1.3
Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Judul Referensi	Permasalahan	Konsep/Teori	Persamaan	Perbedaan
1.	Electronic Fortification in Phoenix – Surveillance Technologies and Social Regulation in Residential Communities	Perbedaan praktik dan hubungan kekuasaan yang ditimbulkan dengan memasukkan teknologi pengawasan ke dalam komunitas tempat tinggal (peran teknologi pengawasan dalam menstrukturisasi pengalaman sosial)	Konsep “kantong benteng” (Blakely dan Snyder 1997, Landman 2002, Mycoo 2006) Konsep privatisasi ruang publik Teresa P.R. Caldeira Konsep neo-liberalisme Monahan (2006)	Penelitian melakukan pengamatan 3 jenis perumahan yang salah satunya memiliki karakteristik sama dengan perumahan Belanak, yaitu perumahan berpagar yang berpori. (Perumahan memiliki pagar dan CCTV namun mudah diakses orang asing)	Penelitian melakukan perbandingan dengan beberapa tipe perumahan lain untuk dihubungkan dengan konsep pemerintahan neo-liberal
2.	Effectiveness and Social Costs of Public Area Surveillance for Crime Prevention	Adanya bentuk pengawasan lain yang sama efektifnya atau jika tidak lebih efektif dari CCTV, dapat membebaskan biaya	- Pencegahan kejahatan situasional : pengawasan alami dan informal - Kontrol sosial informal dan kohesi masyarakat.	- Penelitian menggambarkan berbagai bentuk teknik pengawasan dan melihat keterhubungan aspek masyarakat dan aspek pengawasan/keamanan	- Penelitian memperhitungkan biaya sosial dari penggunaan CCTV yaitu pengucilan sosial terhadap kelompok masyarakat terpinggirkan.

		<p>sosial yang lebih rendah pada masyarakat.</p> <p>Pengawasan lainnya yang patut dipertimbangkan : perbaikan penerangan, satpam, manajer tempat, penutupan jalan/barikade)</p>	<p>- Disorganisasi sosial : kejahatan berasal dari kontrol sosial yang buruk</p>	<p>- Penelitian memperhitungkan kasus kejahatan di kawasan perumahan/pemukiman</p>	<p>- Penelitian tidak membahas panopticon penggunaan CCTV sebagai pendisiplinan tindakan dan aktivitas individu</p>
3.	<p>The Paradoxes in the Use of the Panopticon as a Theoretical Reference in Urban Video-surveillance Studies: A Case Study of a CCTV System of a Brazilian City</p>	<p>Tafsir literal panopticon yang hanya melihatnya sebagai model arsitektur institusi sosial tertutup.</p>	<p>Panopticon Foucault : instrumen normalisasi yang menginternalisasikan kedisiplinan dalam diri individu</p>	<p>- Penggunaan konsep panopticon untuk melihat penginduksian kontrol/dispilin oleh individu yang diawasi</p>	<p>- Penelitian membandingkan penggunaan CCTV di beberapa kawasan (pemukiman mewah, area komersi, dan pemukiman umum) yang pengawasannya dijalankan oleh negara</p>
4.	<p>Surveillance in Practice: Operators' Collective</p>	<p>Cara operator CCTV sebagai pengontrol dan</p>	<p>Interaksionisme simbolik Goffman: negosiasi praktik</p>	<p>- Penelitian menggali cara <i>operator</i> mengidentifikasi</p>	<p>- Penelitian tidak menggunakan konsep</p>

	Interpretation of CCTV Images	pemilah orang, memaknai gambar CCTV melalui pertukaran relasional	dan wacana di tempat kerja mereproduksi nilai dan aturan. Konsep <i>frame</i> dan <i>keying</i> Goffman. Manajemen emosi Hochschild : operator dalam kerjanya melakukan manajemen emosi melalui humor kontroversial	aktivitas individu/kelompok sebagai wajar dan tidak wajar.	panopticon untuk melihat kontrol yang dihasilkan CCTV. Penelitian membahas interaksi sehari-hari operator CCTV dalam struktur kelembagaan dan budaya yang ada - Setting lokasi lebih mengarah pada ruang publik seperti alun-alun kota
5.	Urban Mobility and Activity Space	Keterhubungan ruang aktivitas dengan gambaran mobilitas perkotaan	Teori disorganisasi sosial	- Penelitian menunjukkan ada ketimpangan dalam ruang aktivitas perkotaan yang dapat mempengaruhi kejahatan dan pola perilaku menyimpang - Ruang aktivitas bersama mempengaruhi jaringan/hubungan yang	- Penelitian tidak membahas terkait penggunaan CCTV sebagai kontrol sosial dan konsep panopticon yang bekerja didalamnya

				terbentuk dalam masyarakat	
6.	Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (Suatu Analisis Tentang Penerapan Konsep Defensible Space-nya Newman dalam Upaya Pencegahan Kejahatan di Komplek Perumahan Pesona Depok I)	Operasionalisasi konsep defensible space terhadap urgensi kejahatan di Komplek Perumahan Pesona Depok I	Konsep <i>defensible space</i> oleh Newman Konsep pencegahan kejahatan oleh Vestermark dan Blauvelt	Penelitian menganalisa perumahan tertutup sebagaimana karakteristik Pemukiman Belanak	Penelitian mengamati pencegahan kejahatan pemukiman dengan <i>defensible space</i> (CPTED) yang lebih mengarah pada normal <i>surveillance</i> , sedangkan cctv merupakan <i>formal surveillance</i> .

Sumber : Data olahan peneliti (2021)

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Panopticon

Panopticon merupakan suatu konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Panopticon merupakan gagasan arsitektural penjara yang memiliki bangunan pinggir berbentuk melingkar dengan menara di tengah-tengahnya. Menara ini memiliki satu jendela lebar yang mengarah ke sisi dalam ring, sedangkan bangunan pinggir terbagi ke dalam beberapa sel dan memiliki dua jendela (satu mengarah keluar untuk cahaya masuk dan satu lagi mengarah ke jendela menara).¹³ Asal ide panopticon Bentham ini sendiri ialah sebuah rencana pembangunan sekolah militer di Perancis yang menjadi solusi untuk efisiensi penanganan sejumlah besar orang. Rancangan ini berasal dari kakaknya yang bernama Samuel.¹⁴ Arsitektur dari penjara panopticon ini menyajikan suatu bentuk kebebasan tahanan dari kekerasan institusional yang lebih koersif dan umum terjadi pada masa tersebut.

Penjara panopticon merupakan salah satu dari 4 bentuk panopticon, yang menurut Brunon Ernst, dibuat oleh Bentham. Ketiga bentuk lain yang dimaksudkan ialah *pauper panopticon* (panopticon orang miskin), *chrestomathic panopticon*, dan *constitutional panopticon* (panopticon konstitusional).¹⁵ *Pauper panopticon* merupakan bentuk bangunan yang

¹³ Michel Foucault, 2019, *Discipline and Punish*, New York, Vintage Books, hlm. 194-195

¹⁴ Dr. Sugeng Pujileksono, 2017, *Sosiologi Penjara*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 110

¹⁵ Masa Galic, Tjerk Timan, Bert-Jaap Kooops, 2017, Bentham Deleuze and Beyond: An Overview of Surveillance Theories from the Panopticon to Participation, *Philosophy and Technology* 30(1), hlm. 12

ditujukan untuk memberi perlakuan berbeda pada keragaman populasi miskin (usia, latar belakang, dan pekerjaan). Orang-orang miskin masuk ke dalam *pauper panopticon* secara sukarela. Dalam bangunan tersebut, diterapkan prinsip '*earn-first*' yang mengatur pemberian makan dan izin meninggalkan panopticon, berdasarkan terselesaikannya bagian dari pekerjaannya. Adapun untuk anak-anak di dalam panopticon, diizinkan meninggalkan panopticon jika dirinya berusia 17 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki.¹⁶

Selanjutnya, *chrestomathic panopticon* atau sekolah yang berbentuk panopticon merupakan bangunan yang memungkinkan penguasa/*master* mengawasi 600 siswa pada setiap ruangnya, tanpa terlihat. Kontrol yang dijalankan pada *chrestomathic panopticon* bersifat terbatas, karena pelatihan hanya berlangsung sementara, yaitu ketika siswa berada di sekolah saja. Selain itu, siswa tidak dimasukkan ke dalam struktur kelas yang tetap. Mereka dapat merubah kategori dan kelasnya berdasarkan umur, mata pelajaran, dan tingkat pencapaiannya. Terakhir, *constitutional panopticon* atau panopticon konstitusional merupakan bentuk panopticon Bentham yang memiliki prinsip pengawasan terbalik, karena fokusnya adalah fungsional dari pemerintahan. Panopticon ini ditunjukkan untuk memastikan metode penggunaan panoptik oleh pemerintah, tidak mengalami kesalahan aturan atau *misrule*. Sama seperti *chrestomathic panopticon*, kontrol dijalankan secara terbatas, yaitu hanya saat pemerintah

¹⁶ *Ibid*, 13

menjalankan tugas publiknya. Bentuk arsitekturalnya tergambar ke dalam segi tiga belas dengan surat kabar sebagai peran kunci dalam menyampaikan informasi tentang *misrule*, memeriksa dan mengkritiknya. Dengan demikian, inspeksi tidak lagi berlangsung sentral melainkan tersebar.¹⁷

Berangkat dari gagasan arsitektural Bentham, Foucault menggambarkan relasi kekuasaan, pengetahuan, dan tubuh yang terjadi pada masyarakat modern saat ini. Analisis tersebut kemudian dikenal dengan konsep *governmentality* yang merupakan perluasan dari *disciplinary power*. Awal mula model kekuasaan pendisiplinan ditemukan ialah abad ke-18 di Eropa. Model kekuasaan *disciplinary power* yang bersifat kapiler, mengarahkan operasi kekuasaan ke dalam tubuh individu dan mempengaruhi tindakan, sikap, wacana, proses belajar, dan kehidupan sehari-harinya. Desain paksaan halus melalui institusi tertutup, seperti rumah sakit/pusat rehabilitasi, institusi pendidikan, dan penjara tersebut menjadikan kekuasaan lebih ringan dan efektif.¹⁸

Apabila objek kekuasaan pada *disciplinary power* – sebagaimana disebutkan sebelumnya – adalah tubuh individu, pada *governmentality*, tubuh sosial atau populasi ditempatkan sebagai objek kekuasaannya. *Governmentality* merupakan bentuk rasionalisasi kekuasaan negara agar kekuasaannya diakui (*legitimate*) dan tidak melahirkan anti-kekuasaan.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, 14

¹⁸ Foucault, *Op.cit.*, 203

¹⁹ Abdil Mughis Mudhoffir, 2013, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 18(1), hlm. 86

Foucault menyebutkan bahwa penundukan dalam *governmentality* menjadi tidak terasa dan hanya dapat diketahui dari efeknya, karena negara menggunakan relasi sosial dan aparat atau institusi-institusi sosial dalam menginduksi pilihan-pilihan tindakan yang dikehendaki oleh negara.²⁰

Jadi, panopticon merupakan konsep kekuasaan yang berangkat dari desain arsitektural yang menciptakan kondisi pengendalian diri. Panopticon merupakan bentuk pendisiplinan yang terlihat halus, karena pemerintah melalui relasi sosial dan institusi-institusi sosial mengendalikan populasi dan sumber daya yang ada. Panopticon menggambarkan situasi keterkekangan masyarakat modern dalam *governmentality*.

1.6.2 Surveillance

Surveillance atau pengawasan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengecek dan memastikan suatu hal terlaksana sesuai harapan dan tujuan. Secara etimologi, *surveillance* berasal dari suku kata, yaitu ‘sur’ yang artinya dari atas (*from above*) dan ‘veillance’ yang artinya untuk melihat (*to watch*). Dengan demikian, singkatnya, *surveillance* adalah aktivitas melihat dari atas – aktivitas yang memungkinkan pemantauan secara menyeluruh.²¹ *Surveillance* merupakan kajian multi-disiplin yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Secara garis besar, teori *surveillance* dapat disusun ke dalam 3 kelompok/fase. Fase pertama, proyek

²⁰ *Ibid*, 97

²¹ Galic, *Op.cit.*, 10

arsitektural penjara Bentham dan analisis disiplin Foucault. Foucault – sebagaimana telah dijelaskan pada konsep panopticon sebelumnya – menggunakan bangunan arsitektural Bentham untuk diproyeksikan ke bagian lain masyarakat, yaitu analisa masyarakat disipliner yang terbentuk melalui pendekatan teknokratis pemerintah.²²

Fase kedua, teori surveillance pasca panopticon. Dalam fase ini terjadi pergeseran fokus pengawasan dari institusi ke jaringan dan dari bentuk disiplin yang relatif nyata ke bentuk kontrol yang buram. Pengawasan bergantung pada digital ketimbang teknologi fisik. Landasan awal ialah pemikiran Deleuze dan Guattari yang menyebutkan adanya pergeseran dari masyarakat disipliner (*disciplinary society*) ke masyarakat kontrol (*control society*). Deleuze melihat bahwa kapitalisme dan globalisasi mengubah masyarakat dan institusi (sekolah, rumah, sakit) menjadi suatu korporasi/perusahaan. Pengawasan tidak lagi mementingkan penundukan dan pendisiplinan tubuh, melainkan representasi individu.²³ Berangkat dari Deleuze, Hagerty dan Ericson membentuk konsep *surveillant assemblage*. Inti dari konsepnya melihat pengawasan sebagai fenomena cair, tidak stabil, mengalir melalui dunia maya dan dapat dilihat orang-orang sebagai kumpulan pengawasan ganda.²⁴ Mirip dengan Hagerty dan Ericson, Zuboff mengkonseptualisasikan *surveillance capitalism* yang melihat pengawasan sebagai fitur dominan dan menyeluruh dari masyarakat

²² Galic, *Op.cit.*, 16

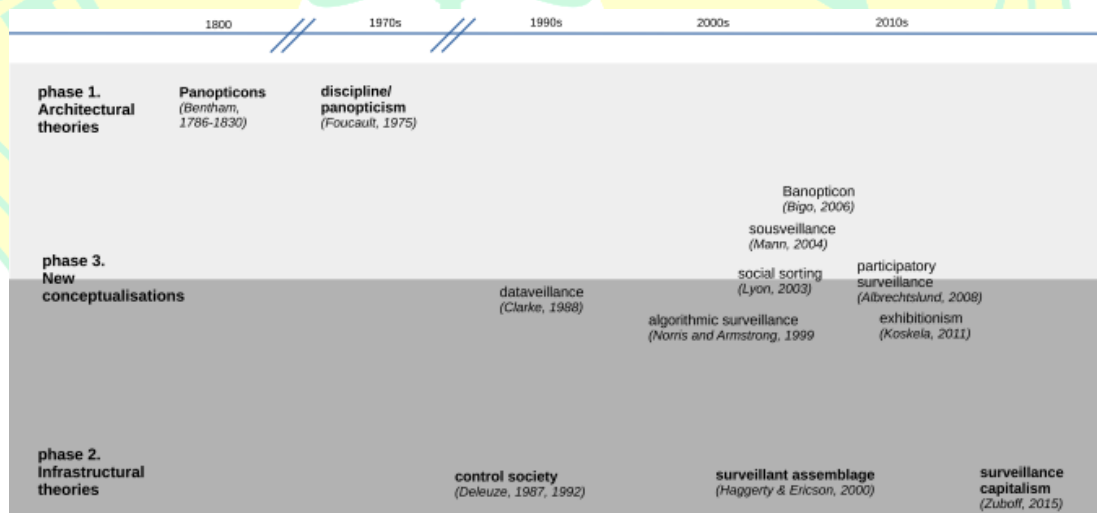
²³ Galic, *Op.cit.*, 20

²⁴ Galic, *Op.cit.*, 23

kapitalis. Zuboff melihat pengawasan melewati pertimbangan privasi dan mengancam demokrasi, karena tidak sejalan dengan kanon politik tatanan liberal modern yang menekankan penentuan nasib sendiri dalam kehidupan pribadi, hubungan sosial, politik, serta pemerintahan.²⁵

Fase ketiga, ialah konseptualisasi pengawasan kontemporer yang menyempurnakan atau mengkombinasi konsep utama yang dikembangkan sebelumnya. Salah satu konsep yang termasuk fase ini ialah konsep *dataveillance* yang dikemukakan Clarke. Dalam konsep ini, sarana komputasi dan informasi digital menjadikan aktor pemerintahan lebih mudah untuk melacak individu atau kelompok, ketimbang pengawasan arsitektural atau institusional yang cenderung berat dan mahal.²⁶ Lebih lengkap terkait konsep lainnya dalam fase ketiga dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
3 Fase Teori Surveillance



Sumber : Galic (2017)

²⁵ Galic, *Op.cit.*, 25

²⁶ Galic, *Op.cit.*, 28

Surveillance seringkali dikaitkan dengan keamanan lingkungan dan wilayah. *Surveillance* merupakan bagian dari pencegahan kejahatan yang secara keilmuan memiliki 3 pendekatan, yaitu *primary prevention* (pencegahan primer), *secondary prevention* (pencegahan sekunder), dan *tertiary prevention* (pencegahan tersier). Dalam pencegahan primer, upaya-upaya yang termasuk ialah perancangan lingkungan, *neighborhood watch* (siskamling), *general deterrence* (penggentaran), *public education* (pendidikan masyarakat) pencegahan secara sosial, dan *private security* (pengamanan swasta). Upaya-upaya ini kemudian dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis *surveillance* yang umum diketahui : *formal surveillance*, *informal surveillance*, *natural surveillance*, dan *surveillance by employee*.

Formal surveillance adalah pengawasan yang memiliki fungsi keamanan secara eksplisit.²⁷ Upaya yang termasuk ke dalam jenis ini ialah penerapan pengamanan swasta (satpam) dan *general deterrence* (polisi). Adapun CCTV juga termasuk ke dalam jenis ini. Selanjutnya, *informal surveillance* atau pengawasan informal. Pengawasan ini berkaitan dengan perancangan lingkungan, baik itu dari segi bangunan, penerangan, jalur akses, maupun penataan properti.²⁸ Bentuk pengawasan informal memiliki hubungan dengan bentuk pengawasan lainnya, yaitu pengawasan alami. Investasi lingkungan yang tergambarkan pada pengawasan informal, dapat

²⁷ S Tiesdell dan T Oc, 1998, Beyond 'Fortress' and 'Panoptic' Cities—Towards a Safer Urban Public Realm, *Environment and Planning B* 25(5), hlm. 647

²⁸ Dadang Sudiadi, 2015, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 100

mendorong terciptanya pengawasan alami, karena meningkatkan kehadiran masyarakat beraktivitas di ruang publik.²⁹ Kehadiran menjadi berarti karena dalam *natural surveillance* atau pengawasan alami, pengenalan masyarakat satu dengan yang lainnya dibutuhkan. Pencegahan dilakukan secara kolektif dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kuat lemahnya kohesi masyarakat.³⁰ Upaya *neighborhood watching* (siskamling) dan *public education* termasuk ke dalam jenis ini. Jenis terakhir, *surveillance by employee* merupakan bentuk pengawasan oleh karyawan yang menempatkan tugas mengawasi sebagai tugas lain dari pekerjaan mereka (tugas kedua. Hal ini menyangkut otoritas yang dimiliki oleh manajer tempat, seperti supir bus, kondektur kereta api, petugas parkir, dan pekerjaan lainnya).³¹

1.6.3 Ruang Perkotaan

Prof. Dr. Damsar dalam bukunya menuliskan bahwa konsep kota merupakan konsep ruang tempat orang menjalani sebagian besar waktunya dalam relasi dengan orang lain yang merupakan produk dari kehendak rasional manusia. Kehendak rasional ini menghasilkan relasi dalam ruang perkotaan bersifat parsial, transaksional, dan netral afeksi.³² Ruang perkotaan merupakan arena bagi kehidupan publik yaitu sebagai arena

²⁹ Tiesdell, *Op.cit.*, 646

³⁰ Dadang Sudiadi, 2001, Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan, *Disertasi*, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 42

³¹ Brandon C. Welsh dkk, 2015, Effectiveness and Social Costs of Public Area Surveillance for Crime Prevention, *Annual Review of Sociology* 1(11), hlm. 120

³² Indrayani, *Op.cit.*, 19

rekreasi, arena sosialisasi, arena integrasi sosial, arena ekonomi, dan arena saluran konflik.³³ Ruang aktivitas bersama dapat menjadi sumber kepercayaan, modal sosial, dan kohesi masyarakat; namun ketidaksetaraan spasial dalam penggunaan ruang aktivitas perkotaan dapat menjadi sumber ketidaksetaraan ras/etnis dan sosial ekonomi, serta ketidaksetaraan dalam proses transisi hidup dari dewasa menuju tua.³⁴ Kathleen A. Cagney dkk mengemukakan bahwa dalam konsep ruang aktivitas perkotaan, terdapat 4 bidang substantif yang menjadi bagian integralnya, yaitu ketidaksetaraan dan segregasi sosial; keterhubungan dan keterlibatan sosial; pola kejahatan dan pelanggaran; kesehatan dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan.³⁵

Kota dengan daya tariknya yang menawarkan aksesibilitas pelayanan masyarakat dan sarana prasarana memadai (kesehatan, pendidikan, transportasi), serta aktivitas ekonomi yang sangat aktif setiap harinya mendorong terjadinya dinamika urbanisasi yang memberikan dampak positif dan negatif bagi kota. Prof Dr. Damsar menggambarkan dampak negatif urbanisasi dalam beberapa poin yang memiliki keterhubungan satu sama lain, dimulai dari adanya persaingan ketat yang meningkatkan pengangguran di perkotaan. Ketidakmampuan bersaing menjadikan individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehingga muncul pemukiman kumuh di perkotaan serta kerawanan sosial dan kriminalitas (penipuan, maling, rampok, prostitusi, perdagangan narkoba).

³³ Indrayani, *Op.cit.*, 213-217

³⁴ Kathleen A. Cagney dkk, 2020, Urban Mobility and Activity Space, *Annual Review of Sociology* 1(46), hlm. 626

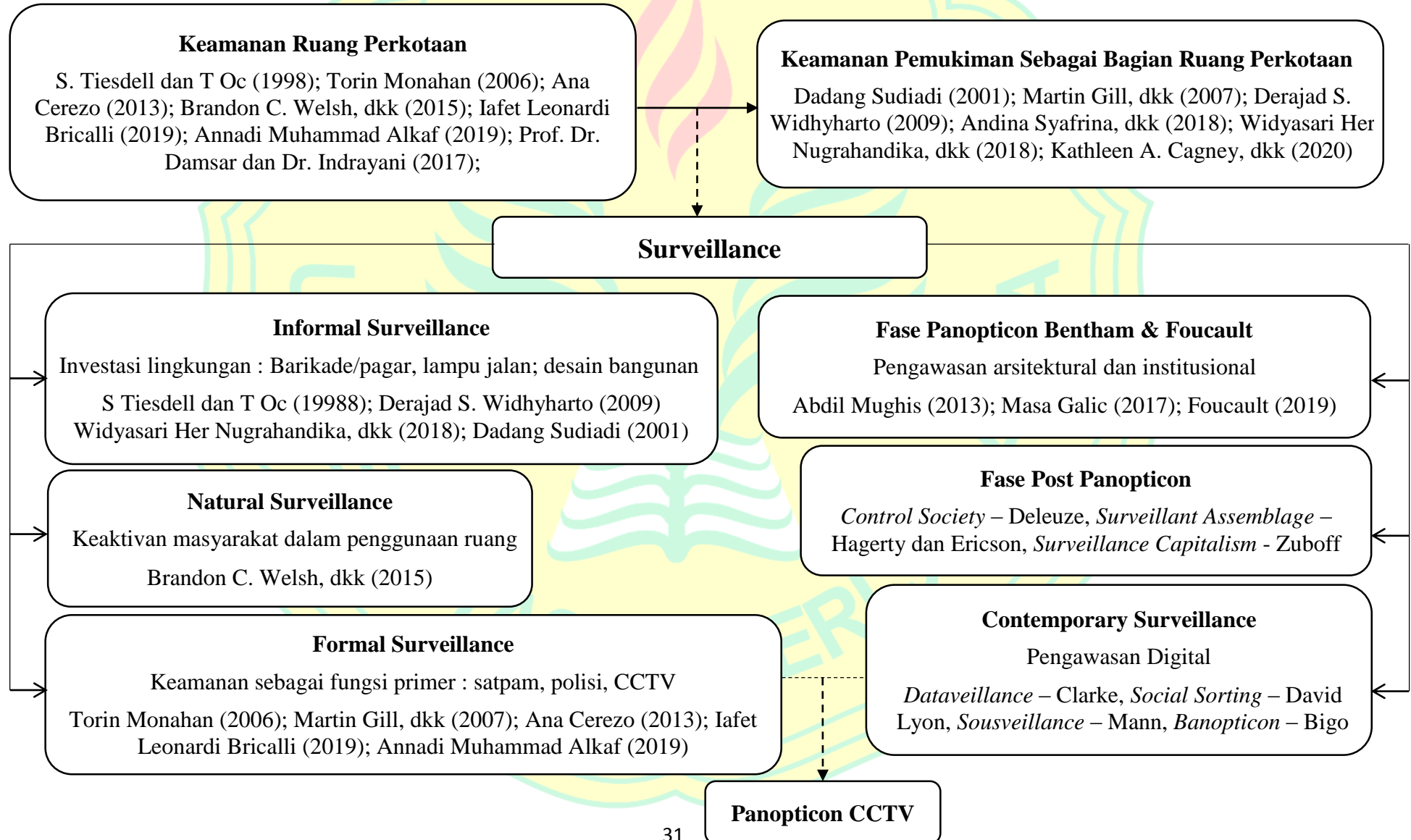
³⁵ *Ibid*, 624

Lebih lanjut, pemukiman kumuh dan tata ruang kota yang memburuk menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat.³⁶ Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan dari ketidakmampuan ruang perkotaan menampung seluruh masyarakat.

Jalanan Pemukiman Belanak merupakan bagian dari ruang aktivitas perkotaan. Ruang ini merupakan ruang publik dan sebagaimana telah disebutkan, ruang publik berperan penting dalam sosialisasi, interaksi dan integrasi masyarakat. Karakteristik masyarakat dan cikal bakal permasalahan dalam masyarakat Pemukiman Belanak dapat dipahami dalam konteks pemakaian bersama ruang publik ini.

³⁶ Indrayani, *Op.cit.*, 138

Skema 1.1
Kerangka Konsep



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Subjek dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian yang menekankan pada Panopticon yang memiliki hubungan dengan pendisiplinan dan CCTV sebagai simbol kekuasaan dan kontrol sosial yang opresif, maka di dalamnya terdapat hubungan antara individu yang dikontrol dan yang mengontrol. Subjek penelitian ini diarahkan kepada Pak Pohan selaku ketua RT 9 yang menginisiasi pemasangan CCTV di daerah Pemukiman Belanak, Pak Asep sebagai ketua RT 11 yang ikut berpartisipasi dan setuju dengan ide pemasangan CCTV, Satpam, 4 penduduk setempat yang diambil 2 dari masing-masing RT, 1 penghuni kost, dan 1 warga dari RT lain pada pemukiman setempat sebagai pembanding. Ketua RT sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kuasa terhadap wilayah administratifnya merupakan subjek yang dapat memberikan informasi terkait dorongan/ide pemasangan CCTV dan karakteristik sosial ekonomiarganya.

Selanjutnya, 4 warga setempat yang dipilih merupakan warga yang telah tinggal lebih dari 20 tahun dalam lingkungan Pemukiman Belanak, sehingga memiliki pengalaman terkait berbagai kontrol sosial yang pernah diterapkan di lingkungan pemukiman, khususnya pada RT 009 dan RT 011. Penelitian juga mencari warga yang masing-masih tinggal di Jalan Belanak yang berbeda sehingga dapat merepresentasikan kondisi dari Jalan Belanak I, Jalan Belanak Raya, Jalan Belanak III, dan Jalan Belanak VI yang terpasang CCTV. Keempat warga ini berperan memberikan informasi

terkait pandangan ataupun persepsinya terhadap kondisi lingkungan pemukiman sebelum dan setelah pemasangan CCTV. Persepsi ini menyangkut efektivitas pengurangan kasus kejahatan dan pandangannya terhadap pengawasan 24 jam dalam mendorong pengendalian diri. Penilaian terhadap efektivitas CCTV sebagai alat kontrol sosial juga dilakukan dengan menjadikan warga RT lain yang tidak melakukan pemasangan CCTV sebagai pembanding kondisi keamanan lingkungan.

Pendukung informasi dalam penulisan, peneliti juga menjadikan satpam sebagai subjek penelitian karena perannya sebagai bagian dari *formal surveillance* yang mengawasi lingkungan, satpam dapat mengetahui dengan jelas kondisi keamanan lingkungan yang tidak hanya pada Pemukiman Belanak, namun juga Pemukiman Ekor Kuning yang dapat memberi pengaruh pada keamanan satu sama lain. Ada pula penghuni kost lingkungan pemukiman setempat yang berada pada jalan yang termonitor rekaman CCTV dijadikan subjek penelitian untuk mengetahui persepsinya menjadi orang asing bagi warga Pemukiman Belanak-Ekor Kuning.

Penelitian ini mengambil *setting* lokasi di Pemukiman Belanak, Kecamatan Pulogadung, khususnya wilayah RT 009 RW 007 dan RT 011 RW 007 yang melakukan pemasangan CCTV. Namun berhubungan dengan situasi pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan penelitian dilakukan melalui jaringan telepon atau *video-call*. Penelitian bersifat *cross-sectional research* yang dilakukan pada satu rentang waktu pendek, yaitu pada bulan September 2020 hingga Februari 2021.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan data primer (data-data yang menangkap relasi kekuasaan yang berlaku dalam CCTV) dan sekunder (data-data yang menambah gambaran lokasi seperti data kependudukan atau data kasus kejahatan). Pengumpulan data-data dilakukan dengan beberapa teknik berikut.

1) Observasi

Penelitian kualitatif deskriptif pada umumnya melakukan studi lapangan yang dimulai dengan memilih kelompok sosial atau lingkungan alami untuk dipelajari dan mengamatinya secara detail.³⁷ Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan melihat secara detail lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan karakteristik Pemukiman Belanak, seperti bentuk bangunan; pembagian jalan dan keadaan jalan yang berhubungan dengan penerangannya; jumlah CCTV terpasang, titik-titik penempatannya, dan jalan-jalan mana saja yang ter-cover oleh CCTV. Selain melakukan pemantauan fisik lingkungan pemukiman, observasi dilakukan juga pada pola interaksi antar-tetangga yang terjadi untuk mendapatkan karakteristik ikatan sosial yang terbangun. Melalui observasi, peneliti juga mendapatkan kontak dari partisipan

³⁷ W. Lawrence Neuman, 2014, *Basic of Social Research:Qualitative & Quantitative Approaches*, USA, Pearson Education Limited, hlm. 37

penelitian. Observasi memungkinkan peneliti membangun konsep ataupun memeriksa konsep awal yang dijadikan landasan.³⁸

2) **Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari lawan bicaranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara terbagi menjadi terstruktur (baku, pertanyaan dan pilihannya tersedia) dan tidak terstruktur (informal, wawancara terbuka, wawancara mendalam).³⁹

Berhubungan dengan penelitian yang dijalankan ialah penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan metode wawancara terbuka dan mendalam dengan tujuan memberikan rasa nyaman kepada partisipan dalam menjelaskan persepsinya terhadap penggunaan CCTV. Wawancara dilakukan dengan subjek utama penelitian maupun dengan subjek-subjek untuk triangulasi data. Proses wawancara menyesuaikan dengan situasi Pandemi Covid dapat dilakukan secara langsung di rumah subjek penelitian ataupun dalam jaringan melalui *video-call* apabila tidak memungkinkan secara langsung.

³⁸ *Ibid*, 43

³⁹ Deddy Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 226

3) Dokumentasi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dikatakan empiris, ketika data tersebut mendokumentasikan peristiwa. Data ini menyangkut rekaman hal yang dikatakan orang (kata dan nada), catatan pengamatan terhadap perilaku tertentu, dokumen tertulis, atau gambar visual.⁴⁰ Dalam penelitian ini data yang didapatkan dari observasi di foto dan dicatat, sama halnya dengan data hasil wawancara dengan subjek penelitian direkam dan dilakukan pencatatan terhadap gestur yang diberikan oleh subjek. Rekaman dilakukan agar tidak ada informasi dari partisipan yang terlewatkan. Data rekaman selanjutnya ditranskripsikan dan dianalisa.

Selain dokumentasi pengamatan dan wawancara, dokumen tertulis dari Kepolisian Sektor Pulogadung untuk data kasus kejahatan yang dilaporkan di Pulogadung dan dokumen tertulis dari Kelurahan Jati dan Suku Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk data kependudukan Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung yang mana Pemukiman Belanak termasuk di dalam wilayah administratif tersebut juga dikumpulkan sebagai data pendukung. Data sekunder lainnya seperti jurnal, buku, dan tesis online digunakan sebagai perbandingan penelitian.

⁴⁰ Neuman, *Op.cit.*, 111

1.7.3 Teknik Triangulasi Data

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi data yang dilakukan ialah triangulasi ahli. Wawancara dilakukan kepada 2 Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNJ, yaitu Bapak Syaifudin, M.Kesos dan Ibu Dr. Ciek Juliati H, MM., M.Si. Pertanyaan kontras ataupun pembuktian diajukan terkait pengaruh interaksi masyarakat terhadap kerawanan pemukiman dan juga terkait kerja CCTV sebagai instrumen kontrol sosial.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data rekaman wawancara dan observasi yang telah ditranskripsikan, selanjutnya dilakukan reduksi data melalui *coding*. Proses *coding data* terbagi ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama, fieldnote wawancara dibuatkan *open coding*. Istilah dan peristiwa penting dikodekan untuk selanjutnya dapat dikategorikan. Tahap kedua, dilakukan *axial coding*, yaitu pengelompokkan atau pengkategorian kode-kode. Tahap ketiga, kelompok yang ada disusun ke dalam skema *selective coding* yang menggambarkan alur cerita/penjelasan. Skema tersebut dinarasikan dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory analysis*) untuk menjelaskan konteks penggunaan CCTV Pemukiman Belanak dalam bingkai konsep Panopticon Foucault.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun oleh peneliti dalam 5 bab dengan pembagian sebagai berikut.

Bab 1 : Peneliti menguraikan latar belakang dari isu yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang hendak dikaji, tujuan dan manfaat dari penelitian untuk individu, institusi/universitas, masyarakat setempat, maupun negara. Peneliti juga memasukkan kerangka konsep, tinjauan penelitian sejenis, dan metodologi penelitian ke dalam bab ini.

Bab 2 : Peneliti mendeskripsikan lokasi penelitian, yaitu lingkungan Pemukiman Belanak, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Pada bab ini dimasukan aspek demografi dari lokasi (jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan umur penduduk) serta aspek sosial ekonomi dari penduduk di Belanak yang menyangkut status dan kisaran pendapatan masyarakat untuk mengategorikan pemukiman ke dalam kelompok kelas menengah atas atau menengah bawah. Pada bab ini, peneliti juga menunjukkan denah lokasi dan keadaan fisik dari jalanan di Pemukiman Belanak. Pokok bahasan terakhir yang dibahas pada bab ini adalah bentuk-bentuk keamanan di pemukiman dan sejarah CCTV sebagai kontrol sosial serta perkembangannya.

Bab 3 : Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil temuan lapangan dari penggunaan CCTV sebagai sistem keamanan Pemukiman Belanak. Peneliti menjelaskan bentuk sistem keamanan sebelumnya yang pernah diterapkan oleh Pemukiman Belanak, proses dari pengadaan CCTV (menyangkut pro-kontra dalam masyarakat dan pendanaan pengadaan CCTV), perubahan

yang timbul setelah pemasangan CCTV, dan persepsi responden (masyarakat Pemukiman Belanak) terkait pengawasan 24 jam.

Bab 4 : Pada bab ini, data-data yang telah didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan konsep panopticon Foucault. Peneliti memberikan penjelasan bagaimana CCTV sebagai instrumen kontrol sosial mampu diinternalisasi oleh penduduk dan setiap orang di lingkungan sekitar sebagai alat pendisiplinan diri. Peneliti juga memberi penjelasan bagaimana CCTV di pemukiman tersebut dapat mengobservasi dan mengoreksi individu yang menyimpang/pelaku tindak kejahatan.

Bab 5 : Bab terakhir ditunjukkan untuk menyimpulkan keseluruhan isi tulisan yang telah dipaparkan dan memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait keamanan masyarakat perkotaan dan penelitian lainnya yang relevan.